

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI
KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN**

(Skripsi)

Oleh

Dwi Oktario Risnadi



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

Dwi Oktario Risnadi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas BUMDes, faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat efektivitas BUMDes, dan tingkat perkembangan BUMDes di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Responden pada penelitian ini sebanyak 45 anggota BUMDes yang ditentukan dengan menggunakan *Random Sampling*. Pengambilan data diambil dari bulan Maret – April 2021 dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk menjawab tujuan pertama dan ketiga, sedangkan pendekatan kuantitatif (*Rank Spearman*) digunakan untuk menjawab tujuan kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas BUMDes di Kecamatan Way Ratai termasuk dalam klasifikasi tinggi berdasarkan pencapaian tujuan BUMDes dan kepuasan anggota. Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas BUMDes yaitu peran pemimpin, partisipasi anggota dan dukungan eksternal. Tingkat perkembangan BUMDes di Kecamatan Way Ratai dengan kategori paling tinggi yaitu BUMDes Tunas Jaya dengan berdasarkan kontribusi dalam sumbangan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang paling tinggi.

Kata kunci : BUMDes, Efektivitas, Kecamatan Way Ratai.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDes) IN WAY RATAI DISTRICT PESAWARAN REGENCY

By

Dwi Oktario Risnadi

This research aims to determine the level of effectiveness of BUMDes, the factors associated with the level of effectiveness, and the level of development of BUMDes. The research location was chosen purposively in Way Ratai District, Pesawaran Regency. Respondents in this study were 45 BUMDes members who were determined using random sampling. Data collection was conducted from March – April 2021 and analyzed using descriptive methods to answer the first and third objectives, while (*Rank Spearman test*) was used to answer the second objective. The results of this research indicate that the level of effectiveness of BUMDes in Way Ratai District is included in the high classification based on the achievement of BUMDes goals and members' satisfaction. Factors related to the effectiveness of BUMDes are the role of leaders, members' participation, and external support. The level of development of BUMDes in Way Ratai District with the highest category is Tunas Jaya BUMDes based on the highest contribution to Village Original Income (PAD).

Key words: BUMDes, Effectiveness, Way Ratai District.

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI
KECAMATAN WAY RATAI KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

Dwi Oktaria Risnati

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN

Pada

Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) DI KECAMATAN WAY
RATAI KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : **Dwi Oktario Risnadi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1754211001**

Program Studi : **Penyuluhan Pertanian**

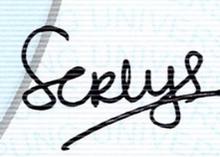
Jurusan : **Agribisnis**

Fakultas : **Pertanian**



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S.
NIP 19550718 198103 1 004


Dr. Serly Silviyanti S., S.P., M.Si.
NIP 19800706 200801 2 023

2. Ketua Jurusan


Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
NIP 19691003 199403 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

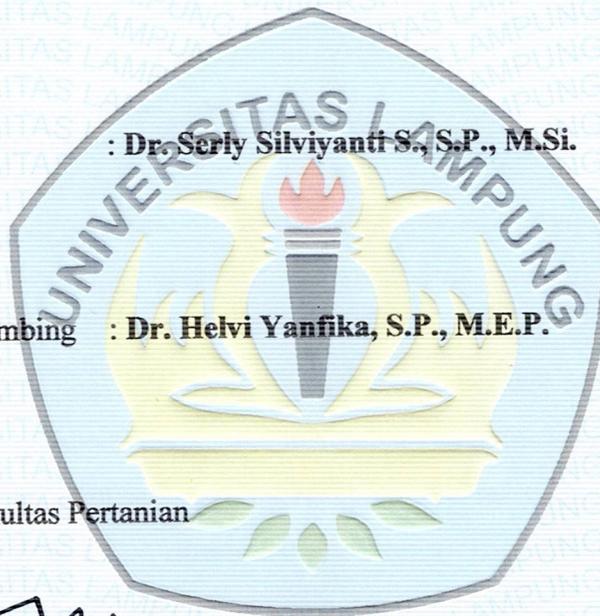
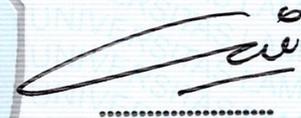
Ketua : **Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S.**



Sekretaris : **Dr. Serly Silviyanti S., S.P., M.Si.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
NIP. 19611020 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Oktober 2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Oktario Risnadi
NPM : 1754211001
Program Studi : S1 Penyuluhan Pertanian
Jurusan : Agribisnis
Fakultas : Pertanian
Alamat : Desa Sumberdadi, Kelurahan Margodadi, Kecamatan
Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 30 November 2021
Penulis,



Dwi Oktario Risnadi
NPM 1754211001

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Ambarawa pada tanggal 18 Oktober 1998. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sunarto, A.Md., dan Ibu Ngadinem, S.Pd. Penulis telah menyelesaikan studi tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di TK Aisyah Ambarawa pada tahun 2006, tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Margodadi pada tahun 2011, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2014, dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Ambarawa pada tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2017 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).

Pada tahun 2018, penulis mengikuti kegiatan *Homestay* (Praktik Pengenalan Pertanian) di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2020. Pada bulan Juli 2020 penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Kopi Gunung Ikamaja Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat selama 30 hari kerja efektif. Selama masa perkuliahan, Penulis aktif sebagai anggota Divisi 1 (satu) bidang Akademik dan Pengembangan Profesi pada Himpunan Mahasiswa Agribisnis (HIMASEPERTA) Periode 2018/2019.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirrabbi'alamiin, Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat hidyah, dan nikmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran**”. Banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, nasihat, serta saran-saran yang membangun dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini, karena itu dengan rendah hati Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Dr. Teguh Endaryanto S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas pengarahan serta nasihat yang diberikan.
3. Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas pengarahan serta nasihat yang diberikan.
4. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S., sebagai Dosen Pembimbing pertama atas ketulusan hati dan kesabaran, bimbingan, motivasi, arahan, nasihat, dan perhatian serta ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada Penulis dari awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. Serly Silviyanti S, S.P., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan ketulusan hati dan kesabaran, bimbingan, arahan, motivasi, perhatian, nasihat, saran, dan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis selama proses penyelesaian skripsi.

6. (Almh) Ir. Begem Viantimala, M. S., sebagai Dosen Pembimbing yang pernah memberikan arahan, semangat, motivasi, ketulusan hati, kesabaran, ilmu, materi, bimbingan, nasihat, saran, ketelatenan, dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Dr. Helvi Yanfika, S.P., M.E.P. sebagai Dosen Pembahas atas ketulusannya memberikan masukan, arahan, motivasi, bimbingan, nasihat, saran, dan ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Dr. Ir. Dame Trully Gultom, M. Si. selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi selama masa perkuliahan.
9. Teristimewa kedua orangtuaku, Ayahanda Sunarto dan Ibunda Ngadinem tercinta, yang senantiasa dengan kesabaran telah membesarkan, mendidik, memberikan semangat, motivasi, nasihat, saran, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tak pernah terputus hingga tercapainya gelar Sarjana Pertanian ini.
10. Kakakku Maya Ardiana, S.Pd., dan adikku Nadila Agestia tercinta yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis.
11. Sahabat terbaik seperjuanganku semasa perkuliahan, kelompok belajar "*Trabas Team*": Ferdy Ronaldi, Nanda Pardani, Khoirul Anam, Ahmad Anjaswara, Iqbal Assalafi, dan Firman Indra Saputra, yang selalu memberikan semangat, motivasi, canda, tawa, saran, dan bantuan serta kebersamaan selama ini.
12. Istikomatin Napsiah, S.Pd., seseorang yang selalu memberikan dukungan, perhatian, motivasi, dan bantuan kepada Penulis.
13. Teman terbaik seperjuanganku semasa perkuliahan, Fifi, Risa, Desva, Amirul, Ragil, Indah Mur, dan Yati yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan kebersamaan selama ini.
14. Keluarga KKN Unila Tanjung Mas Jaya SP 07 2020, Haikal, Fikri, Ica, Atika, Dwi, Yola, Pak Yatno, Pak Gimin, Pak Imam, Pak Karto, Ibu Pranti, Ibu Arsita, Ibu Desi, Ibu Munawaroh, dan Ibu Ros atas kekeluargaan,

kebersamaan, pelajaran, canda, dan tawa serta semua cerita yang telah dirajut bersama.

15. Seluruh dosen dan staf administrasi Jurusan Agribisnis Unila, Mbak Iin, Mbak Tunjung, Mas Bukhori, Mas Boim, dan seluruh karyawan FP Unila, atas jasa-jasa kalian Penulis dapat menyelesaikan studi.
16. Teman-teman seperjuangan Program Studi Penyuluhan Pertanian angkatan 2017 atas kebersamaan, bantuan, dan kerjasamanya serta semangat yang selalu diberikan kepada Penulis.
17. Keluarga besar Agribisnis angkatan 2017 terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama menyelesaikan skripsi.
18. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. *Aamiin ya Rabbalalaamiin.*

Bandar Lampung, Oktober 2021

Penulis,

Dwi Oktario Risnadi

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
A. Tinjauan Pustaka	7
1. Pengertian BUMDes.....	7
2. Tujuan Pendirian BUMDes	8
3. Landasan Hukum BUMDes	11
4. Prinsip Pengelolaan BUMDes	14
5. Indikator Perkembangan BUMDes	15
6. Konsep Efektivitas.....	16
7. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas.....	19
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Hipotesis.....	28
III. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	29
A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional	29
1. Variabel Bebas (X)	29
2. Variabel Terikat (Y)	32
B. Penentuan Lokasi, Waktu, dan Responden Penelitian	35
C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	36
D. Metode Penelitian dan Analisis Data	37
E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	39

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran.....	46
1. Keadaan Geografi.....	46
2. Keadaan Iklim.....	48
3. Keadaan Demografi.....	48
B. Gambaran Umum Kecamatan Way Ratai.....	49
1. Keadaan Geografi.....	49
2. Keadaan Demografi.....	50
3. Keadaan Pertanian.....	51
C. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	52
1. Gambaran Umum BUMDes Tunas Jaya.....	52
2. Gambaran Umum BUMDes Jaya Mandiri.....	53
3. Gambaran Umum BUMDes Tunas Jaya Asri.....	54
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Keadaan Umum Responden.....	56
1. Umur Responden.....	56
2. Tingkat Pendidikan Formal Responden.....	57
B. Deskripsi Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas BUMDes (Variabel X).....	58
1. Peran Pemimpin (X ₁).....	59
2. Partisipasi Anggota (X ₂).....	60
3. Dukungan Eksternal (X ₃).....	62
4. Tingkat Pengetahuan Anggota tentang BUMDes (X ₄).....	65
C. Deskripsi Tingkat Efektivitas BUMDes (Variabel Y).....	67
1. Pencapaian tujuan BUMDes.....	67
2. Kepuasan Anggota.....	69
D. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	70
1. Hubungan antara Peran Pemimpin dengan Efektivitas BUMDes di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	71
2. Hubungan antara Partisipasi Anggota dengan Efektivitas BUMDes di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	72
3. Hubungan antara Dukungan Eksternal dengan Efektivitas BUMDes di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	74
4. Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Anggota dengan Efektivitas BUMDes di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.....	75
E. Deskripsi Tingkat Perkembangan BUMDes.....	76
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sebaran jumlah BUMDes menurut tingkat keaktifan di Provinsi Lampung 2020	3
2. Sebaran jumlah BUMDes di Kabupaten Pesawaran 2020	4
3. Kajian penelitian terdahulu	22
4. Pengukuran variabel bebas (X)	30
5. Pengukuran variabel terikat (Y)	33
6. Data jumlah populasi dan sampel penelitian anggota BUMDes di Kecamatan Way Ratai.....	36
7. Hasil uji validitas peran pemimpin (X ₁).....	41
8. Hasil uji validitas partisipasi anggota (X ₂).....	42
9. Hasil uji validitas dukungan eksternal (X ₃).....	43
10. Hasil uji validitas tingkat pengetahuan anggota tentang BUMDes(X ₄).....	43
11. Hasil uji validitas efektivitas BUMDes (Y)	44
12. Hasil uji reliabilitas	45
13. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran.....	47
14. Luas wilayah menurut desa di Kecamatan Way Ratai	50
15. Jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Way Ratai	51
16. Sebaran responden berdasarkan umur	56
17. Sebaran responden berdasarkan pendidikan formal	57
18. Sebaran responden berdasarkan tingkat peran pemimpin dalam BUMDes.....	59
19. Sebaran responden berdasarkan tingkat partisipasi dalam BUMDes...	61
20. Sebaran responden berdasarkan dukungan pemerintah desa	63
21. Sebaran responden berdasarkan sarana prasarana BUMDes.....	64

22. Sebaran responden berdasarkan tingkat pengetahuan anggota tentang BUMDes	66
23. Tingkat efektivitas berdasarkan pencapaian tujuan BUMDes.....	68
24. Tingkat efektivitas berdasarkan kepuasan anggota BUMDes.....	69
25. Hasil pengujian statistik faktor – faktor yang berhubungan dengan efektivitas BUMDes	71
26. Rekapitulasi data hasil usaha BUMDes tahun 2020	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	27

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pembangunan pada sektor perekonomian secara nasional menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia saat ini, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera (Kemendesa, 2016).

Sejalan dengan itu, menurut Kemendesa (2015), dengan menyesuaikan kebijakan prioritas program pembangunan berbasis *Nawacita* yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, terdapat beberapa poin sasaran di dalamnya. Salah satunya pada poin ketiga *Nawacita* yaitu prioritas membangun Indonesia dari pinggiran yakni dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Berangkat dari kebijakan tersebut bermakna bahwa desa, daerah tertinggal, dan pinggiran adalah sebagai sasaran dari pengembangan harus dilakukan perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Salah satu fokus utama peningkatan sasaran tersebut dengan cara mengembangkan perekonomian lokal desa yang berbasis potensi serta kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Terdapat 82 persen wilayah Indonesia adalah kawasan pedesaan dan sekitar 50 persen penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan pedesaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan bertujuan untuk membangun kemandirian dengan mengutamakan kearifan dan potensi lokal wilayah pedesaan itu sendiri. Rancangan kebijakan dan program-program yang ditetapkan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah telah dilakukan guna mewujudkan pembangunan pedesaan yang lebih baik.

Berbagai kemajuan telah dirasakan oleh sebagian masyarakat pedesaan dengan adanya kebijakan dan program-program dari pemerintah tersebut. Kenyataan di lapangan sebagian besar wilayah pedesaan masih banyak yang belum berkembang secepat wilayah lainnya (Bapennas, 2014).

Upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan ekonomi desa adalah dengan membentuk lembaga ekonomi yang berbasis kewirausahaan desa yang dikelola secara kolektif antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Upaya tersebut dapat diartikan bahwa dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat desa (Ansari, 2016). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk mengelola perekonomian, kebutuhan serta potensi desa. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka diharapkan desa mampu mengelola dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa itu sendiri melalui Badan Usaha Milik Desa (Kemendesa, 2015).

Latar belakang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sendiri dipercaya sebagai tahap awal dalam membentuk kemandirian ekonomi desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini disebabkan ekonomi pedesaan adalah sentra utama untuk meningkatkan kemajuan pembangunan dan pendapatan asli pedesaan. Alkadafi (2014), menyebutkan dalam penelitiannya ditemukan bahwa BUMDes mampu meningkatkan pengelolaan potensi desa dan mampu menggerakkan perekonomian desa yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa. Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat menciptakan kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Bertitik tolak pada pengembangan tersebut, maka pemerintah desa dan

masyarakat desa mempunyai kewajiban untuk menggali, mengelola dan mengembangkan potensi yang ada.

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa wilayah pedesaan. Adapun sebaran data jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Provinsi Lampung Tahun 2020 yang tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran jumlah BUMDes menurut tingkat keaktifan di Provinsi Lampung 2020

No	Kabupaten	Jumlah			Status BUMDes	
		Kecamatan	Desa	BUMDes	Aktif (%)	Tidak Aktif (%)
1	Lampung Selatan	17	256	256	57	43
2	Lampung Tengah	28	301	265	76	24
3	Lampung Utara	23	232	213	46	54
4	Lampung Barat	15	131	131	90	10
5	Tulang Bawang	15	147	139	74	26
6	Tanggamus	20	299	123	39	69
7	Lampung Timur	24	264	260	87	13
8	Way Kanan	14	221	137	56	44
9	Pesawaran	11	144	143	87	13
10	Pringsewu	9	126	126	86	14
11	Mesuji	7	105	105	65	35
12	Tulang Bawang Barat	9	93	92	73	27
13	Pesisir Barat	11	116	82	46	54

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Lampung, 2020.

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu wilayah yang memiliki desa dengan jumlah BUMDes terbanyak kelima di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesawaran juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah BUMDes dengan status keaktifan BUMDes yang tinggi yaitu sebesar 87 persen. Berikut sebaran jumlah data Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pesawaran tahun 2020 yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran jumlah BUMDes di Kabupaten Pesawaran 2020

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Klasifikasi BUMDes		
			Dasar	Tumbuh	Berkembang
1	Gedong Tataan	19	16	1	2
2	Marga Punduh	10	7	3	-
3	Way Lima	15	15	-	-
4	Way Khilau	10	5	5	-
5	Way Ratai	10	6	-	4
6	Padang Cermin	11	9	1	2
7	Punduh Pidada	13	13	-	-
8	Negeri Katon	19	1	15	3
9	Tegineneng	16	14	2	-
10	Teluk Pandan	11	4	4	3
11	Kedondong	9	9	-	-
Jumlah		143	94	37	14

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran, 2020.

Berdasarkan Tabel 2, Kecamatan Way Ratai merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang memiliki jumlah BUMDes berkembang terbanyak. Terdapat banyak potensi dari desa-desa di Kecamatan Way Ratai yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dan mendorong kemandirian perekonomian desa. Hasil *pra survey*, tidak semua BUMDes di wilayah tersebut tingkat perkembangannya berjalan maksimal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola BUMDes dan kurangnya partisipasi aktif dari para anggota. Adapun juga faktor kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana atau pengurus BUMDes sehingga mengakibatkan minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat yang berdampak pada kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap program usaha BUMDes. Sebagian desa yang memiliki keberhasilan perkembangan BUMDes di wilayah ini disinyalir oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya faktor peran pemimpin BUMDes dan adanya partisipasi aktif dari anggota BUMDes itu sendiri dalam melaksanakan kegiatan usaha atau program unit – unit usaha.

Keberhasilan BUMDes dapat diukur dengan melihat efektivitas kegiatan usaha BUMDes yang dilaksanakan di Kecamatan Way Ratai. Terjadinya perbedaan keberhasilan perkembangan BUMDes tentu merupakan suatu permasalahan. Efektivitas merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi atau lembaga. Efektivitas dalam BUMDes digunakan untuk menganalisa seberapa jauh tujuan-tujuan BUMDes yang tercapai dan belum tercapai, sehingga perencanaan kegiatan usaha akan berjalan kearah yang lebih produktif dan efektif (Kusnadi, 2006). Selain itu, efektivitas BUMDes dapat tercapai bila faktor-faktor yang mempengaruhinya saling mendukung. Oleh karena itu, efektivitas BUMDes sangat dibutuhkan, karena dengan BUMDes yang berhasil dalam mengelola kegiatan usaha dengan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan baik, maka dapat memberikan manfaat bagi anggota. Berdasarkan penjelasan di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?
2. Faktor - faktor apa saja yang berhubungan dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?
3. Bagaimana tingkat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui tingkat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
3. Mengetahui tingkat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Masyarakat desa, sebagai bahan referensi dan masukan dalam pengelolaan unit usaha BUMDes dengan harapan memberikan informasi dalam mengembangkan unit usaha, sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa.
2. Pemerintah, sebagai pertimbangan dalam memberikan kebijakan tentang pengelolaan usaha BUMDes di Kecamatan Way Ratai.
3. Peneliti lain, sebagai bahan sumber informasi dan kajian untuk peneliti lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Purnomo, 2016).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Menurut Purnomo (2016) terdapat 8 (delapan) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga perekonomian lainnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa atau antar desa yang dikelola secara bersama.
- b. Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa.
- c. BUMDes ditetapkan melalui peraturan desa dan peraturan bersama kepala desa untuk BUMDes bersama antar desa.
- d. Modal usaha bersumber dari desa melalui penyertaan modal desa dan dari masyarakat.

- e. Lembaga di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil.
- f. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi lokal yang dimiliki.
- g. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa.
- h. Pelaksanaan operasionalisasi kegiatan diawasi oleh (pemerintah desa, BPD, dan masyarakat).

Berdasarkan pendapat lain menurut (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007) menyebutkan terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*).
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*).
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

2. Tujuan Pendirian BUMDes

Tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai wadah untuk mengorganisasikan rakyat desa dan meningkatkan semangat mereka dalam memperkuat dan mengembangkan ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga dijadikan sarana berbagi kelompok-kelompok

masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sekaligus membahas strategi pengembangan pemasarannya (Purnomo, 2016).

Mengacu pada Kemendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 dalam Wijaya (2018), tujuan didirikannya lembaga usaha BUMDes meliputi:

1. Menciptakan peluang dan jaringan pasar.
2. Meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan atau peningkatan jasa pelayanan umum.
5. Membuka lapangan kerja.
6. Meningkatkan dan mendukung usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa.
7. Mengoptimalkan aset desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola bersama masyarakat dan pemerintah desa. Undang-undang menyatakan bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi.
(Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sarana guna menjalankan usaha di desa. Usaha desa sendiri dapat diartikan jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

1. Usaha jenis keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
2. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agribisnis.
4. Industri dan kerajinan rakyat (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Pemerintah desa juga ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Latar belakang didirikannya BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa Pasal 213
 - 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - 2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 3) Badan usaha milik desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes pasal 2

“Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar-desa”.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes pasal 4
 - 1) Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
 - 2) Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa.
 - b) Potensi usaha ekonomi desa.
 - c) Sumber daya alam di desa.
 - d) Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes.
 - e) Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes pasal 5
- 1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
 - 2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
 - b) Organisasi pengelola BUMDes.
 - c) Modal usaha BUMDes.
 - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
 - 3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian BUMDes pasal 6
- 1) Dalam rangka kerja sama antar-desa dan pelayanan usaha antar-desa dapat dibentuk BUMDes bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
 - 2) Pendirian BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari:
 - a) Pemerintah desa.
 - b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - c) Lembaga kemasyarakatan desa.

- d) Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
 - 3) Ketentuan mengenai musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDes bersama.
 - 4) BUMDes bersama ditetapkan dalam Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes bersama.
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes pasal 7
- 1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
 - 2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
 - 3) Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes pasal 8
- BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:
- 1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes pasal 9
 “Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa”.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes pasal 10
 - 1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
 - a) Penasihat.
 - b) Pelaksana Operasional.
 - c) Pengawas.
 - 2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Purnomo (2016) BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatannya.
- b. BUMDes adalah bersifat sosial (*social entrepreneurship*), tidak semata-mata mencari keuntungan.
- c. BUMDes harus dikelola oleh pihak-pihak yang independen. Pengelola tidak boleh dari unsur pemerintahan desa.
- d. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat desa yang sudah berjalan tetapi BUMDes mengonsolidasi untuk meningkatkan kualitas usaha mereka.

Lebih lanjut prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan cara yang sama oleh Pemerintah Desa, anggota, BPD, Pemkab, dan Masyarakat.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntable*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

5. Indikator Perkembangan BUMDes

Menurut Aeni (2020) penilaian BUMDes berdasarkan klasifikasi perkembangannya didasarkan pada enam dimensi, yaitu (1) kelembagaan, (2) aturan, (3) usaha, (4) administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, (5) permodalan dan aset, serta (6) dampak BUMDes terhadap masyarakat dan desa. Enam dimensi tersebut memiliki bobot yang berbeda dimana usaha merupakan dimensi dengan bobot tertinggi sebesar 25 persen. dimensi kelembagaan dan dimensi dampak BUMDes terhadap masyarakat desa memiliki bobot masing-masing 20 persen. Permodalan dan aset merupakan dimensi dengan

bobot 15 persen dan dimensi aturan serta dimensi administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban memiliki bobot terendah sebesar 10persen. Setiap dimensi memiliki beberapa parameter dimana setiap parameter memiliki nilai minimal 1 dan maksimal 4. Metode kuantitatif deskriptif diimplementasikan dengan menghitung total skor dari keenam dimensi pengukuran kinerja BUMDes. Selanjutnya, BUMDes diklasifikasikan dalam empat tingkat perkembangan, yaitu dasar (25-49), tumbuh (50-74), berkembang (75-85), dan maju (>85).

Tingkat perkembangan BUMDes menurut Baradi (2019) dapat dilihat dari seberapa besar pengelolaan hasil kegiatan usaha BUMDes dapat berkontribusi atau memberikan sumbangan dalam peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Kirowati (2018) menyatakan bahwa indikator tingkat perkembangan BUMDes dapat dilihat dari sejauh mana unit usaha yang dikelola BUMDes dapat memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang manfaatnya bisa dirasakan langsung seperti dengan membuka usaha baru, merekrut tenaga kerja, meningkatkan akses pelayanan umum desa, dan memberikan keikutsertaan dalam pembangunan, serta memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat.

6. Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan telah berhasil dengan baik. Menurut Soekanto (1990) efektivitas berasal dari kata “*effectiveness*” yang artinya taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Pasolong (2007), berpendapat bahwa istilah efektivitas digunakan sebagai hubungan sebab akibat, yang dimana pada dasarnya berasal dari kata “efek”. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu sebab

dari variabel lain. Efektivitas berarti tujuan atau sasaran yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai karena adanya proses kegiatan. Mahmudi (2010) menyebutkan efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Beni, 2016). Lebih lanjut Siagian (2001), mengemukakan bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2017), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahmudi (2005), menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana organisasi atau lembaga usaha dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dengan mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektivitas

juga diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan dengan tercapainya keadaan dan perubahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Kreitner dan Kinicki (1992) dalam Ambarwati (2018) menyebutkan terdapat dua pendekatan multidimensional yang cocok dalam mengukur keefektifan organisasi apabila sudah terdapat sasaran atau tujuan yang jelas dan adanya peran pemimpin yang kuat di dalamnya yaitu:

a. Pencapaian tujuan

Pendekatan ini menekankan bahwa kemampuan organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan organisasi dapat dicapai atau direalisasikan.

b. Kepuasan anggota

Pendekatan ini menekankan pada penilaian yang meliputi tingkat perasaan seseorang setelah melihat kinerja (atau hasil) dari organisasi yang diikuti dengan bagaimana organisasi tersebut membuat keseimbangan para anggota dalam mencapai kepuasan, walaupun dalam kadar minimal, dalam semua urusan. Kepuasan anggota dapat dilihat dari kepuasan terhadap peranan, perasaan terhadap organisasi, kepuasan terhadap kebebasan berpartisipasi dan kepuasan terhadap peraturan organisasi (Mayer dan Dollar, 1987:57) dalam Astuti (2010).

Kaplan & Norton dalam (Armia, 2002) menemukan suatu model yang memberikan alternatif untuk perbaikan dalam pengukuran efektivitas organisasi yang dikenal sebagai “*Balance scorecard*” yang menggunakan pengukuran internal maupun eksternal, kuantitatif maupun kualitatif. Dimana terbagi menjadi 4 perspektif, yaitu: 1) keuangan, 2) pelanggan, 3) internal proses, dan 4) inovasi. Perspektif tersebut oleh Smith (1997) dikembangkan dalam beberapa indikator, yaitu :

- a. Keuangan: diukur dengan indikator aliran kas, pertumbuhan penjualan, dan pangsa pasar.
- b. Pelanggan: penjualan produk baru, ketepatan waktu pengiriman, kualitas layanan.
- c. Internal proses: pemeringkatan teknologi, produktivitas, biaya per unit, dan *cycle* kelompok.
- d. Inovasi: waktu yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk, waktu yang digunakan untuk merespon pasar, dan *focus* terhadap produk baru.

6. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Efektivitas

Perkembangan BUMDes di Kecamatan Way Ratai tidak terlepas dari beberapa faktor di dalamnya. Berhasil atau tidaknya organisasi atau lembaga usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dapat dilihat pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dan juga diikuti dengan tercapainya keadaan serta perubahan yang memuaskan anggotanya. Rachmawati (2008) mengemukakan bahwa keefektifan organisasi dipengaruhi oleh adanya faktor internal dan eksternal. Menurut Furqon (2018) terdapat faktor internal yang berhubungan dengan keberhasilan BUMDes dalam menjalankan kegiatan unit usahanya yaitu kualitas sumber daya manusia (pemimpin). Pemimpin membantu mendorong kinerja BUMDes yang lebih tinggi dengan mengarahkan dan memberikan kegiatan – kegiatan yang mempengaruhi anggota dalam mencapai tujuan BUMDes. Gorda (2006), menyatakan pemimpin adalah orang yang membina dan menggerakkan seseorang atau kelompok orang, agar mereka bersedia, komitmen dan setia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Fungsi utama kepemimpinan dalam hubungannya dengan peningkatan aktivitas dan efisiensi organisasi yaitu sebagai seorang pembaharu atau *inovator, communicator, motivator, dan controller*.

1. Fungsi kepemimpinan sebagai *innovator*
Pimpinan mengadakan berbagai inovasi baik yang menyangkut pengembangan produk, sistem manajemen yang efektif dan efisien, maupun di bidang konseptual yang keseluruhannya dilaksanakan dalam upaya mempertahankan dan atau meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Fungsi kepemimpinan sebagai *communicator*
Pemimpin mensosialisasikan berbagai ide, gagasan, rencana dan program kerja serta mengadakan komunikasi dengan berbagai pihak yang ada hubungannya dengan kegiatan pencapaian tujuan perusahaan.
3. Fungsi kepemimpinan sebagai *motivator*
Pemimpin mendorong dan memberikan semangat kepada karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara ikhlas untuk mencapai tujuan perusahaan.
4. Fungsi kepemimpinan sebagai *controller*
Pemimpin mengawasi dan mengendalikan berbagai aktivitas perusahaan ke arah efisiensi dan efektivitas.

Menurut Handayani (2020), partisipasi anggota merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan efektivitas dari BUMDes. Partisipasi anggota dalam BUMDes membantu kelancaran kegiatan usaha BUMDes dengan memberikan bantuan berupa tenaga dan pemikiran agar tercapainya tujuan BUMDes yang telah ditetapkan. Partisipasi adalah keikutsertaan seorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Mardikanto, 1987). Menurut Menurut Cohen dan Uphoff (1979) dalam Nasdian (2006) terdapat empat macam kegiatan partisipasi dalam program, berikut adalah uraian dari masing-masing tahapan partisipasi yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan
Bentuk partisipasi ini diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud di sini yaitu keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
Bentuk partisipasi ini merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Partisipasi dalam evaluasi.
Bentuk partisipasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
Tahap pemanfaatan hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran.

Menurut Satia (2018) efektivitas program BUMDes dipengaruhi oleh dukungan eksternal atau dukungan dari luar lembaga seperti penilaian anggota terhadap dukungan pemerintah desa dan sarana prasarana yang memadai. Adanya dukungan eksternal membantu tercapainya sasaran dalam program pengembangan usaha pedesaan. Dukungan dari pemerintah desa dilihat dari sejauh mana kegiatan usaha BUMDes didukung oleh pemerintah desa. Dukungan sarana prasarana penunjang

BUMDes dapat dilihat dari mudah tidaknya lokasi ditempuh oleh anggota, serta ada tidaknya bangunan fisik untuk BUMDes dan kenyamanan tempat tersebut, serta ada tidaknya fasilitas penunjang kegiatan unit usaha.

Lebih lanjut, Mutakin (2013) menyebutkan faktor penting dalam upaya mewujudkan efektivitas dari suatu program pembangunan masyarakat desa yaitu tingkat pengetahuan anggota, peran fasilitator dan tim pengelola kegiatan. Tingkat pengetahuan anggota merupakan salah satu faktor penting didalamnya. Tingkat pengetahuan anggota tentang BUMDes merupakan pengetahuan yang dimiliki anggota mengenai BUMDes terhadap tujuan, manfaat, dan sumber pendanaan, serta struktur organisasi pelaksanaan BUMDes. Semakin tinggi tingkat pengetahuan terhadap program atau lembaga usaha, diduga akan semakin tinggi partisipasi dalam kegiatan usaha di dalamnya. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan anggota menjadi indikator yang penting dan perlu dikaji dalam penelitian hubungannya dengan efektivitas BUMDes.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebuah acuan teori-teori atau berupa temuan dari hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting sebagai data pendukung dari sebuah penelitian. Kajian penelitian terdahulu sangat diperlukan sebagai bahan referensi dan literatur guna mempermudah Penulis dalam memberikan konsep gambaran mengenai penelitian yang dilakukan Penulis. Terdapat beberapa penelitian yang dimasukkan yaitu penelitian yang terkait dengan efektivitas program. Penelitian terdahulu mengenai efektivitas program dan faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas dapat diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kajian penelitian terdahulu

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Mutakin, 2013	Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat	Metode survei dengan analisis deskriptif kuantitatif	Program PNPM-MP sudah cukup efektif, faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas PNPM-MP adalah tingkat pengetahuan, faktor yang tidak berhubungan dengan efektivitas PNPM-MP adalah tingkat partisipasi.
2.	Diarti, 2020	Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan BUMDes Se-Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik	Metode survei dengan analisis deskriptif kuantitatif	Hasil dari temuan data penelitian ini menyatakan bahwa “Terdapat Hubungan Signifikan Antara Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik Desa”. Temuan data tersebut, dibuktikan dari hasil $r_{hitung} = 0,592$ (dalam kategori tingkat hubungan “Sedang” dengan nilai $0,40-0,599$), $t_{tabel} = 0,514$ dari taraf kesalahan 5 persen.
3.	Safira, 2018	Efektivitas Program Upsus Pajale terhadap Peningkatan Pendapatan Usahatani di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	Metode survei dengan analisis deskriptif kuantitatif	Hasil studi menyimpulkan Program Upsus Pajale kurang efektif. Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas Program Upsus Pajale di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah tingkat pengetahuan anggota kelompok tani, motivasi anggota kelompok tani,

Tabel 3. Lanjutan

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
				tingkat partisipasi anggota kelompok tani, dan peran penyuluh pertanian lapangan.
4.	Furqon, 2018	Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Masyarakat Pada BUMDes Desa Rombasan Sumenep	Metode survei dengan analisis deskriptif kuantitatif	Peran pemimpin berpengaruh terhadap produktifitas masyarakat dalam mengembangkan usaha di Desa Rombasan Sumenep adapun pengaruh yang diberikan oleh variabel tersebut sebesar 0,853 atau 85,3persen. Nilai Uji t atau t_{hitung} untuk Kepemimpinan sebesar 7,014 dengan probabilitas 0,00 dengan probabilitas 0,00 sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,645 dan taraf nyata sebesar 0,05
5.	Sasauw, 2018	Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Masyarakat di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe	Metode survei dengan analisis deskriptif kualitatif	Pencapaian target dari badan usaha Milik Desa “Aldus” cukup baik di lihat dari berjalannya roda organisasi BUMdesa secara teratur, dan juga neraca organisasi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemampuan dari masing-masing Pengurus Badan Usaha Milik Desa “Aldus” dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing berjalan dengan baik.

Tabel 3. Lanjutan

No	Penulis, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian dan Metode Analisis	Hasil Penelitian
6.	Nurhasan, 2020	Efektivitas Peran BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu	Metode survei dengan analisis deskriptif kualitatif	BUMDes mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya. Beberapa unit usaha yang di didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru, serta membantu masyarakat memobilisasi potensi yang dimilikinya. Adanya BUMDes memberikan motivasi dan stimulus masyarakat dalam mengembangkan usahanya guna meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.

C. Kerangka Pemikiran

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha pedesaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan kegiatan unit usaha BUMDes dapat berupa pengelolaan aset dan potensi lokal desa yang meliputi jasa pelayanan, usaha perdagangan, usaha perantara dan pengolahan hasil pertanian, serta usaha penyewaan.

Kehadiran BUMDes membantu dalam mengembangkan dan mendayagunakan aset dan potensi lokal desa serta turut meningkatkan perekonomian desa dengan menumbuhkan iklim usaha pedesaan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan kegiatan usaha, tentunya terdapat sasaran program atau tujuan utama yang ingin dicapai dari setiap kegiatan usahanya. Diperlukan kajian tentang efektivitas BUMDes untuk dapat melihat sejauh mana tujuan utama BUMDes yang ditetapkan sesuai dengan hasil pelaksanaan BUMDes di lapangan. Adapun itu melalui BUMDes yang pengelolaannya efektif maka dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi anggota dan meningkatkan perekonomian desa. Berdasarkan uraian di atas perlu dikaji apakah pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes sudah efektif di lapangan.

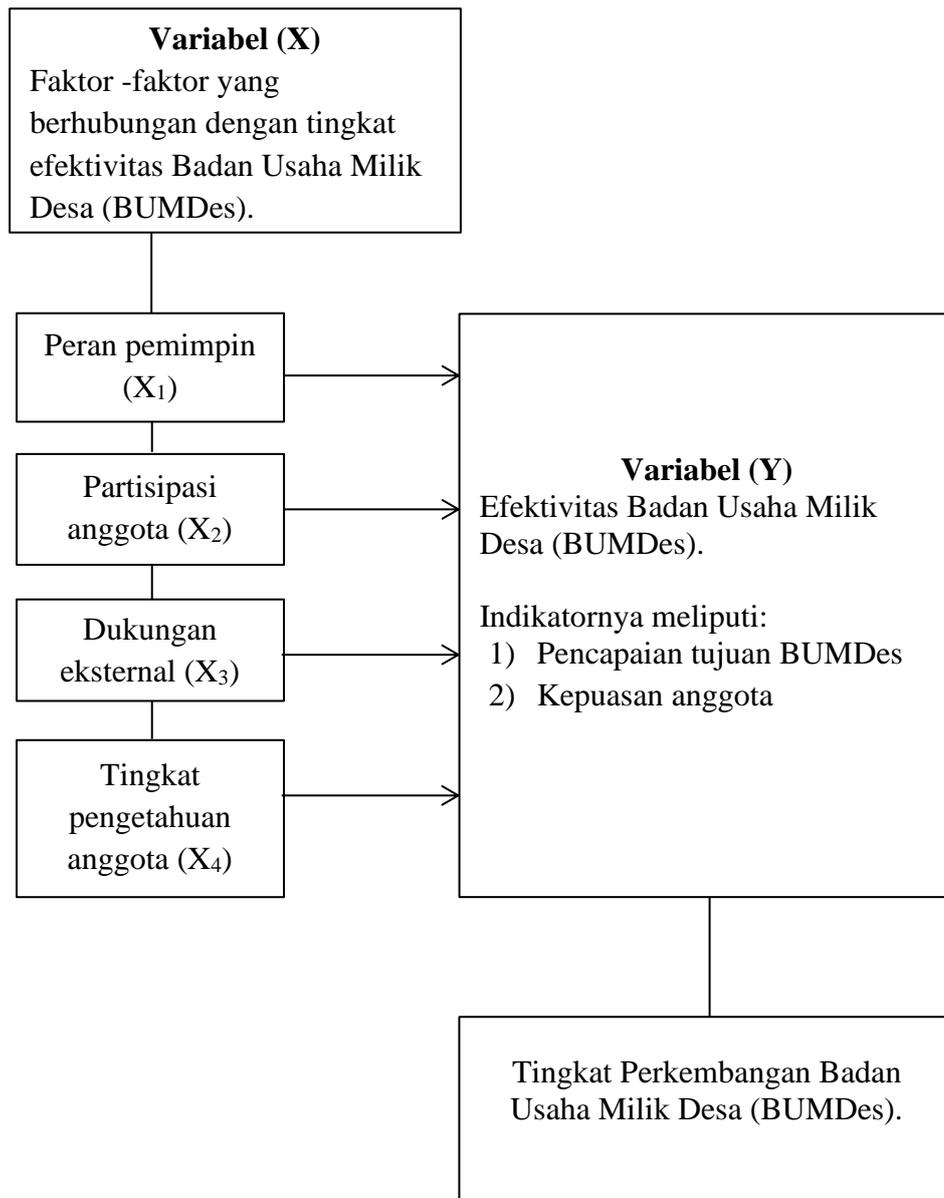
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan efektif apabila faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas BUMDes saling mendukung. Menurut Furqon (2018) faktor yang berhubungan dengan efektivitas BUMDes dalam pencapaian tujuan utamanya yaitu peran pemimpin. Pemimpin membantu mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan mengarahkan dan memberikan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi anggotanya dalam mencapai tujuan. Menurut Handayani (2020) partisipasi anggota dalam BUMDes membantu kelancaran usaha BUMDes dengan memberikan bantuan berupa tenaga dan pemikiran. Menurut Satia (2018) dukungan eksternal membantu tercapainya

sasaran dalam program pengembangan usaha pedesaan seperti dukungan pemerintah desa dan sarana prasarana yang memadai. Menurut Mutakin (2013) faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas program pembangunan masyarakat desa yaitu tingkat pengetahuan anggota, peran fasilitator, dan tim pengelola kegiatan.

Berdasarkan acuan teori tersebut ditentukan bahwa faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan efektivitas BUMDes pada penelitian ini yaitu menurut Furqon (2018), Handayani (2020), Satia (2018), serta Mutakin (2013) yang meliputi peran pemimpin (X_1), partisipasi anggota (X_2), dukungan eksternal (X_3), tingkat pengetahuan anggota (X_4).

Tolak ukur efektivitas BUMDes (Y) pada penelitian ini diukur berdasarkan teori Kreitner dan Kinicki (1992) dalam Ambarwati (2018) yang meliputi pencapaian tujuan dan kepuasan anggota. Sedangkan untuk mengukur sejauh mana tingkat perkembangan BUMDes pada penelitian ini mengacu teori menurut Baradi (2019) dimana seberapa besar pengelolaan hasil kegiatan usaha BUMDes dapat berkontribusi atau memberikan sumbangan dalam peningkatan sumber pendapatan asli desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat diketahui hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dalam kerangka pemikiran pada Gambar 1.



Keterangan :

- > : Diuji secara statistik
 ————— : Tidak diuji secara statistik

Gambar 1. Paradigma Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran di atas, maka didapatkan hipotesis dari penelitian ini yaitu:

1. Diduga terdapat hubungan nyata antara peran pemimpin dengan dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai.
2. Diduga terdapat hubungan nyata antara partisipasi anggota dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai.
3. Diduga terdapat hubungan nyata antara dukungan eksternal dengan dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai.
4. Diduga terdapat hubungan nyata antara tingkat pengetahuan anggota dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai.

III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional merupakan konsep yang mencakup aspek penelitian yang memberikan informasi penjelasan definisi dari setiap variabel yang akan diteliti sebagai instrumen petunjuk dalam memperoleh data yang akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan keperluan analisis pada penelitian ini terdapat 2 variabel yang didefinisikan yaitu:

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai. Berdasarkan hipotesis yang telah dirancang pada penelitian ini dapat diuraikan ukuran dan batasan – batasan dari variabel yang akan diukur. Adapun beberapa variabel yang berhubungan dengan tingkat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi peran pemimpin (X_1), partisipasi anggota (X_2), dukungan eksternal (X_3), dan tingkat pengetahuan anggota (X_4). Untuk mengetahui konsep pengukuran variabel bebas (X) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran variabel bebas (X)

No	Variabel X	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Kategori
1.	Peran pemimpin (X ₁)	Pelaksanaan tugas pemimpin dengan mempengaruhi dan mengarahkan para anggota untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian tujuan BUMDes.	<p>a. Fungsi <i>innovator</i> Pemimpin mengadakan berbagai inovasi baik yang menyangkut pengembangan produk, sistem manajemen yang efektif dan efisien.</p> <p>b. Fungsi <i>communicator</i> Pemimpin mensosialisasikan berbagai ide, gagasan, rencana dan program kerja serta mengadakan komunikasi dengan berbagai pihak.</p> <p>c. Fungsi <i>motivator</i> Pemimpin memberikan dorongan dan semangat kedalam diri anggota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara ikhlas untuk mencapai tujuan.</p> <p>d. Fungsi <i>controller</i> Pemimpin mengawasi dan</p>	<p>Tidak berperan = 1</p> <p>Kurang berperan = 2</p> <p>Berperan = 3</p> <p>Sangat berperan = 4</p>

Tabel 4. Lanjutan

No	Variabel X	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Kategori
			mengendalikan berbagai kegiatan unit usaha BUMDes ke arah efisiensi dan efektivitas.	
2.	Partisipasi anggota (X ₂)	Keikutsertaan atau peran serta anggota BUMDes dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil.	a. Ikut serta dalam perencanaan. b. Ikut serta dalam pelaksanaan. c. Ikut serta dalam evaluasi. d. Ikut serta dalam pemanfaatan hasil.	Tidak berpartisipasi = 1 Kurang berpartisipasi = 2 Berpartisipasi = 3 Sangat berpartisipasi = 4
3.	Dukungan eksternal (X ₃)	Bentuk dukungan dari luar BUMDes berupa moril dan materil yang membantu pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes.	a. Dukungan pemerintah desa. b. Sarana prasarana BUMDes.	Tidak mendukung = 1 Kurang mendukung = 2 Mendukung = 3 Sangat mendukung = 4
4.	Tingkat pengetahuan anggota tentang BUMDes (X ₄)	Segala sesuatu yang diketahui anggota mengenai BUMDes.	Kemampuan responden menjelaskan tentang BUMDes. 1. Tujuan BUMDes. 2. Struktur organisasi BUMDes. 3. Sumber pendanaan BUMDes. 4. Manfaat BUMDes.	Tidak mengetahui = 1 Kurang mengetahui = 2 Mengetahui = 3 Sangat mengetahui = 4

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat (Y) adalah efektivitas Badan Usaha Milik (BUMDes). Efektivitas BUMDes adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan BUMDes melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Untuk mengetahui konsep pengukuran variabel bebas (X) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran variabel terikat (Y)

Variabel Y	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Kategori
Efektivitas BUMDes	Keberhasilan BUMDes untuk mencapai tujuan yang dapat dilihat pada tercapainya program atau kegiatan unit usaha yang membawa perubahan dan memuaskan anggotanya.	1. Pencapaian tujuan BUMDes. Diukur dengan sejauh mana tercapainya tujuan atau sasaran BUMDes dan anggota dalam hal	Tidak tercapai = 1
		a. Penciptaan jaringan pasar oleh BUMDes. b. Peningkatan pendapatan asli desa. c. Peningkatan pendapatan anggota. d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum. e. Pembukaan lapangan kerja. f. Pemberian dukungan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. g. Pengoptimalan aset desa.	Kurang tercapai = 2 Tercapai = 3 Sangat tercapai = 4
		2. Kepuasan anggota	Tidak puas = 1
		a. Kepuasan anggota terhadap perannya dalam BUMDes.	Kurang puas = 2
		b. Perasaan bangga anggota terhadap BUMDes.	Puas = 3
		c. Kepuasan anggota terhadap kebebasan berpartisipasi dalam:	Sangat puas = 4

Tabel 5. Lanjutan

Variabel Y	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran	Kategori
		1) Perencanaan kegiatan.	
		2) Pelaksanaan kegiatan.	
		3) Evaluasi kegiatan.	
		4) Pemanfaatan kegiatan.	
		d. Kepuasan anggota terhadap peraturan BUMDes.	

B. Penentuan Lokasi, Waktu dan Responden Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Adapun lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Way Ratai merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pesawaran yang memiliki jumlah BUMDes dengan klasifikasi berkembang terbanyak pada tahun 2020. Terdapat empat desa di Kecamatan Way Ratai yang memiliki BUMDes dengan klasifikasi berkembang pada tahun 2020 yaitu Desa Gunung Rejo, Desa Ceringin Asri, Desa Wates Way Ratai, serta Desa Harapan Jaya. Penelitian ini hanya mengambil tiga desa yaitu Desa Gunung Rejo, Desa Ceringin Asri, dan Desa Harapan Jaya. Penentuan lokasi desa dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa ketiga desa tersebut memiliki BUMDes paling aktif pada unit-unit usahanya. Adapun pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2021.

Pemilihan responden pada penelitian ini adalah anggota BUMDes Tunas Jaya, BUMDes Tunas Jaya Asri, dan BUMDes Jaya Mandiri Kecamatan Way Ratai. Sampel pada penelitian ini berasal dari populasi anggota BUMDes yang terdiri dari tiga BUMDes dengan total sebanyak 259 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* dengan cara undian. Menurut Sugiyono (2001), penentuan sampel dengan *random sampling* merupakan pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Metode penentuan jumlah unit sampel dalam penelitian ini merujuk pada teori perhitungan menurut Sugiarto (2003), yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2}$$

$$n = \frac{259 (1,64)^2 (0,05)}{259 (0,05)^2 + (1,64)^2 (0,05)} = 45$$

Keterangan:

n = Unit sampel

N = Unit populasi

S^2 = Variasi sampel (5% = 0,05)

Z = Tingkat kepercayaan (90 % = 1,64)

d = Derajat penyimpangan (5% = 0,05)

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh jumlah responden sebanyak 45 anggota. Penentuan jumlah unit sampel dari masing - masing BUMDes dilakukan dengan menggunakan rumus alokasi *proporsional sample* (Nazir, 1988) sebagai berikut :

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan :

ni = Jumlah sampel menurut stratum

n = Jumlah sampel seluruhnya

Ni = Jumlah populasi menurut stratum

N = Jumlah populasi seluruhnya

Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel responden pada ketiga BUMDes yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Data jumlah populasi dan sampel penelitian anggota BUMDes di Kecamatan Way Ratai

No	Nama BUMDes	Jumlah populasi (orang)	Jumlah Sampel (orang)
1	Tunas Jaya	115	20
2	Jaya Mandiri	42	7
3	Tunas Jaya Asri	102	18
	Jumlah	259	45

Sumber : Hasil *pra survey* di lapangan (2020).

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini jenis data yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer didapatkan dengan teknis wawancara secara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirancang terlebih dahulu. Daftar pertanyaan tersebut berisi

kumpulan pertanyaan yang mencakup efektivitas BUMDes. Selanjutnya data sekunder didapatkan melalui buku-buku, literatur, studi kepustakaan, laporan, data umum potensi desa serta instansi dan lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung pada sikap, pendapat, atau persepsi responden tentang BUMDes. Penghitungan *scoring* dilakukan dengan menggunakan skala *Likert* yang pengukurannya sebagai berikut (Riduwan, 2009) :

- a. Skor 4 untuk jawaban sangat setuju
- b. Skor 3 untuk jawaban setuju
- c. Skor 2 untuk jawaban kurang setuju
- d. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju

D. Metode Penelitian dan Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode penelitian survei merupakan penelitian yang dilakukan dalam populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang digunakan adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Riduwan, 2009).

Penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk menjawab tujuan pertama dan tujuan ketiga pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang berdasarkan dari catatan-catatan hasil pengamatan secara langsung di lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Jawaban – jawaban dan data yang didapatkan dari anggota BUMDes selaku responden tersebut kemudian diolah dan ditulis dalam bentuk narasi yang terstruktur dan terinci dalam menggambarkan tingkat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.

Tujuan kedua pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistika nonparametrik analisis korelasi *Rank Spearman* dengan

SPSS 25.0. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa jenis hipotesis yang akan diuji adalah hipotesis korelasi yaitu menguji keeratan hubungan antara faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Adapun rumus uji *Rank Spearman Siegel* (1985) sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n^2}$$

Keterangan:

r_s = Koefisien korelasi

d_i = Perbedaan setiap pasangan rank

n = Jumlah sampel

Rumus r_s ini dipakai atas dasar pertimbangan bahwa dalam penelitian ini akan mengetahui keeratan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sesuai dengan fungsi r_s yang merupakan ukuran asosiasi dua variabel yang berhubungan, diukur sekurang-kurangnya dengan skala ordinal (berurutan), sehingga objek atau individu yang dipelajari dapat diberi peringkat dalam rangkaian berurutan. Selanjutnya apabila terdapat peringkat yang mempunyai nilai sama dalam variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), maka dibutuhkan faktor koreksi T, dengan rumus:

$$r = \frac{\sum x^2 + \sum y^2 - \sum d_i^2}{2\sqrt{\sum x^2 + \sum y^2}}$$

$$\sum x^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

$$\sum T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan :

$\sum x^2$	= Jumlah kuadrat variabel x yang dikoreksi
$\sum y^2$	= Jumlah kuadrat variabel Y yang dikoreksi
T	= Jumlah berbagai harga t untuk semua kelompok yang berlainan dan memiliki observasi bernilai sama
$\sum T$	= Jumlah berbagai T untuk semua kelompok yang berlainan dan memiliki rangking sama
$\sum T_x$	= Jumlah faktor koreksi variabel bebas
$\sum T_y$	= Jumlah faktor koreksi variabel terikat
T	= Banyaknya observasi yang bernilai sama pada suatu peringkat tertentu
N	= Jumlah responden

Dikarenakan jumlah sampel penelitian lebih besar dari sepuluh, maka pengujian dilanjutkan dengan uji-t dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}$$

Kaidah pengambilan keputusan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$ (pada $\alpha = 0,01$) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan yang nyata antara kedua variabel yang diuji.
- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ (pada $\alpha = 0,01$) maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak ada hubungan yang nyata antara kedua variabel yang diuji.

E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan kepada 20 anggota BUMDes Maju Bersama, Desa Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dengan pertimbangan responden memiliki karakteristik dan unit usaha yang sama dengan responden yang akan diteliti yaitu anggota BUMDes yang melakukan kegiatan usaha produksi.

1) Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu uji yang digunakan untuk mengetahui keakuratan atau ketepatan suatu data dari kuisioner. Diperlukan uji validitas pada suatu penelitian, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah item pertanyaan yang akan digunakan mampu mengukur apa yang hendak diukur. Suatu kuisioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner mampu menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dilaksanakannya penelitian tersebut. Nilai uji validitas dalam penelitian ini didapat melalui r_{hitung} dan r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan kuisioner tersebut valid. Rumus mencari r_{hitung} sebagai berikut (Sufren dan Natanael, 2013):

$$r_{hitung} = n \frac{(\sum X_1 Y_1) - (\sum X_1) X (\sum Y_1)}{\sqrt{\{n \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\} X \{n \sum Y_1^2 - (\sum Y_1)^2\}}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi (validitas)
- X = Skor pada atribut item n
- Y = Skor pada total atribut
- XY = Skor pada atribut item n dikalikan skor total
- n = Banyaknya atribut

Hasil uji validitas peran pemimpin (X_1) dapat dilihat pada Tabel 7, partisipasi anggota (X_2) dapat dilihat pada Tabel 8, dukungan eksternal (X_3) dapat dilihat pada Tabel 9, tingkat pengetahuan anggota (X_3) pada Tabel 10, dan efektivitas BUMDes (Y) pada Tabel 11. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 25.0 sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil uji validitas peran pemimpin (X₁)

Butir Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
<i>Peran inovator</i>			
1	0,776	0,444	Valid
2	0,833	0,444	Valid
3	0,503	0,444	Valid
4	0,867	0,444	Valid
5	0,602	0,444	Valid
6	0,827	0,444	Valid
<i>Peran komunikator</i>			
1	0,665	0,444	Valid
2	0,876	0,444	Valid
3	0,895	0,444	Valid
4	0,901	0,444	Valid
5	0,749	0,444	Valid
6	0,721	0,444	Valid
7	0,801	0,444	Valid
<i>Peran motivator</i>			
1	0,645	0,444	Valid
2	0,781	0,444	Valid
3	0,564	0,444	Valid
4	0,618	0,444	Valid
<i>Peran controller</i>			
1	0,835	0,444	Valid
2	0,884	0,444	Valid
3	0,645	0,444	Valid
4	0,635	0,444	Valid

Tabel 8. Hasil uji validitas partisipasi anggota (X₂)

Butir Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
Perencanaan			
1	0,510	0,444	Valid
2	0,789	0,444	Valid
3	0,462	0,444	Valid
4	0,503	0,444	Valid
5	0,529	0,444	Valid
6	0,510	0,444	Valid
7	0,588	0,444	Valid
8	0,735	0,444	Valid
Pelaksanaan			
1	0,633	0,444	Valid
2	0,649	0,444	Valid
3	0,731	0,444	Valid
4	0,727	0,444	Valid
Evaluasi			
1	0,675	0,444	Valid
2	0,665	0,444	Valid
3	0,561	0,444	Valid
4	0,785	0,444	Valid
Pemanfaatan			
Hasil			
1	0,702	0,444	Valid
2	0,765	0,444	Valid
3	0,540	0,444	Valid
4	0,692	0,444	Valid
5	0,813	0,444	Valid

Tabel 9. Hasil uji validitas dukungan eksternal (X₃)

Butir Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
	Dukungan pemerintah desa		
1	0,566	0,444	Valid
2	0,543	0,444	Valid
3	0,691	0,444	Valid
4	0,564	0,444	Valid
5	0,747	0,444	Valid
6	0,763	0,444	Valid
7	0,634	0,444	Valid
	Sarana prasarana BUMDes		
1	0,714	0,444	Valid
2	0,819	0,444	Valid
3	0,883	0,444	Valid
4	0,804	0,444	Valid
5	0,769	0,444	Valid

Tabel 10. Hasil uji validitas tingkat pengetahuan anggota tentang BUMDes (X₄)

Butir Pertanyaan	Nilai r _{hitung}	Nilai r _{tabel}	Keterangan
	Tingkat pengetahuan		
1	0,707	0,444	Valid
2	0,760	0,444	Valid
3	0,857	0,444	Valid
4	0,533	0,444	Valid

Tabel 11. Hasil uji validitas efektivitas BUMDes (Y)

Butir Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
	Pencapaian tujuan BUMDes		
1	0,689	0,444	Valid
2	0,784	0,444	Valid
3	0,535	0,444	Valid
4	0,610	0,444	Valid
5	0,644	0,444	Valid
6	0,565	0,444	Valid
7	0,565	0,444	Valid
	Kepuasan anggota		
1	0,654	0,444	Valid
2	0,660	0,444	Valid
3	0,551	0,444	Valid
4	0,494	0,444	Valid
5	0,529	0,444	Valid
6	0,602	0,444	Valid
7	0,799	0,444	Valid
8	0,509	0,444	Valid

Hasil validitas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, diketahui r_{tabel} dengan jumlah responden sebanyak 20 anggota dengan alpha 0,05 adalah 0,444. Dari tabel diatas diketahui bahwa semua item dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, sehingga dapat kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan pada kuisisioner dinyatakan valid dan seluruh pernyataan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian

3) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana konsistensi dari instrumen yang diukur. Uji reliabilitas dilakukan guna melihat konsistensi dari kuisisioner dalam penelitian. Suatu kuisisioner dapat dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengukuran koefisiensi reliabilitas dapat menggunakan rumus koefisien reliabilitas *Cronbach Alpha* karena pilihan jawaban lebih dari dua, dengan rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right)$$

Keterangan:

- r_{11} = Nilai reliabilitas
 S_i = Varian skor tiap item pertanyaan
 S_t = Varian total
 k = Jumlah item pertanyaan

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Hasil uji reliabilitas

Variabel	Nilai r_{11}	Nilai r tabel	Keterangan
Peran <i>inovator</i>	0,838	0,444	Reliabel
Peran <i>komunikator</i>	0,828	0,444	Reliabel
Peran <i>motivator</i>	0,577	0,444	Reliabel
Peran <i>controller</i>	0,812	0,444	Reliabel
Partisipasi perencanaan	0,750	0,444	Reliabel
Partisipasi pelaksanaan	0,640	0,444	Reliabel
Partisipasi evaluasi	0,633		
Partisipasi pemanfaatan hasil	0,805	0,444	Reliabel
Dukungan pemerintah desa	0,771	0,444	Reliabel
Sarana Prasarana BUMDes	0,869	0,444	Reliabel
Tingkat pengetahuan anggota	0,692	0,444	Reliabel
Pencapaian tujuan BUMDes	0,751		
Kepuasan anggota	0,761	0,444	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa instrumen penelitian untuk variabel semuanya reliabel karena masing-masing nilai r_{11} (koefisien korelasi internal seluruh item) $> 0,444$. Instrumen yang reliabilitas dapat digunakan berulang-ulang kali mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama, sehingga instrumen yang reliabel merupakan persyaratan instrumen layak digunakan untuk instrumen penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesawaran

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Pesawaran secara administratif memiliki luas wilayah sebesar 1.173,77 km² atau sebesar 3,33 persen dari luas wilayah Provinsi Lampung. Secara astronomis, terletak antara 5,12° – 5,84° Lintang Selatan dan 104,92° – 105,34° Bujur Timur. Kondisi permukaan bumi Kabupaten Pesawaran merupakan dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah perbukitan hingga pegunungan dengan ketinggian mencapai 1.682 mdpl (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020).

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- b. Sebelah selatan, berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
- c. Sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- d. Sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran wilayah dengan adanya penambahan 4 kecamatan sehingga jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran menjadi 11 kecamatan, yaitu Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Padang Cermin, Punduh Pidada, Marga Punduh, Kedondong, Way Ratai, Teluk Pandan, dan Way Khilau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran

(2020), luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Pesawaran

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Punduh Pidada	113,19	9,64
2	Marga Punduh	111,00	9,45
3	Padang Cermin	127,34	10,85
4	Teluk Pandan	77,34	6,59
5	Way Ratai	112,95	9,62
6	Kedondong	67,00	5,71
7	Way Khilau	64,11	5,46
8	Way Lima	99,83	8,51
9	Gedong Tataan	97,06	8,27
10	Negeri Katon	152,69	13,01
11	Tegineneng	151,26	12,89
Jumlah		1.173,77	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020.

Luas Kabupaten Pesawaran secara keseluruhan adalah 1.173,77 km². Ibukota Kabupaten Pesawaran berada di Kecamatan Gedong Tataan. Kecamatan Negeri Katon merupakan kecamatan terluas dengan luas sebesar 152,69 km², sedangkan Kecamatan Way Khilau merupakan kecamatan terkecil hanya 5,46 persen dari luas wilayah Kabupaten Pesawaran (64,11 km²). Adapun sebagian luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran yang meliputi 15.269 ha digunakan sebagai lahan sawah sedangkan sisanya yaitu 101.522 ha merupakan lahan bukan sawah dan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun, sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah ladang/kebun/tegal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020).

Kontur wilayah Kabupaten Pesawaran bervariasi mulai dari daerah pesisir hingga perbukitan. Sebanyak 4 kecamatan terletak di wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Marga Punduh, Kecamatan

Padang Cermin, dan Kecamatan Way Ratai. Kecamatan Punduh Pidada merupakan kecamatan di wilayah pesisir yang memiliki jumlah pulau terbanyak mencapai 30 pulau. Sedangkan, wilayah perbukitan paling tinggi berada di Kecamatan Way Lima yang mencapai 700 mdpl.

2. Keadaan Iklim

Kabupaten Pesawaran termasuk daerah tropis, dengan curah hujan rata-rata berkisar 15,5-499 mm, suhu udara rata-rata berkisar 26,39-27,61°C, dan rata-rata kelembaban udara berkisar 81,06 persen – 87,08 persen. Topografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Pesawaran merupakan daerah dataran rendah, dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah perbukitan sampai dengan pergunungan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0,0 m sampai dengan 1.682,0 m (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020).

3. Keadaan Demografi

Berdasarkan data tahun 2020, penduduk Kabupaten Pesawaran mencapai 477.468 jiwa yang terdiri dari 246.002 jiwa penduduk laki-laki dan 231.466 jiwa penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran mencapai 406,78 jiwa/km² dengan luas wilayah sebesar 1.173,77 km². Kecamatan Gedong Tataan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi yakni mencapai 1.106,23 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Punduh Pidada dengan jumlah penduduk 136,93 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020).

B. Gambaran Umum Kecamatan Way Ratai

1. Keadaan Geografi

Kecamatan Way Ratai merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah barat Kabupaten Pesawaran memiliki jarak rata-rata 40,32 km dari ibukota Kabupaten Pesawaran. Secara geografis terletak di sebelah selatan Provinsi Lampung dengan sebagian wilayah berupa perbukitan, dataran landai, dan pesisir pantai. Jumlah desa yang berada di Kecamatan Way Ratai sebanyak 10 desa. Kecamatan Way Ratai memiliki luas wilayah sebesar 127,21 km². Kecamatan ini merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan dari Padang Cermin pada tahun 2014.

Batas-batas wilayah Kecamatan Way Ratai adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
- b. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
- c. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus
- d. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Adapun luas wilayah menurut desa di Kecamatan Way Ratai dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Luas wilayah menurut desa di Kecamatan Way Ratai

No.	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Sumber Jaya	15,62	12,28
2	Bunut Seberang	20,00	15,72
3	Ceringin Asri	6,15	4,83
4	Poncorejo	5,00	3,93
5	Gunung Rejo	10,50	8,25
6	Mulyosari	4,50	3,54
7	Wates Way Ratai	21,56	16,95
8	Bunut	13,88	10,91
9	Pesawaran Indah	15,00	11,79
10	Harapan Jaya	15,00	11,79
Jumlah		127,21	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020.

2. Keadaan Demografi

Kecamatan Way Ratai memiliki jumlah penduduk sebanyak 66.374 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 33.977 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 32.397 jiwa. Kepadatan penduduk di Kecamatan Way Ratai mencapai 434,69 jiwa/km².

Jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Way Ratai dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Way Ratai

No.	Desa	Penduduk (jiwa)		Jumlah Penduduk (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bunut Seberang	1.499	1.388	2.887
2	Sumber Jaya	2.149	1.922	4.071
3	Gunung Rejo	1.850	1.629	3.479
4	Wates Way Ratai	3.547	3.326	6.873
5	Pesawaran Indah	1.889	1.794	3.683
6	Bunut	2.228	2.131	4.359
7	Harapan Jaya	1.593	1.389	2.982
8	Ceringin Asri	1.036	978	2.014
9	Ponco Rejo	898	866	1.764
10	Mulyosari	1.538	1.432	2.970
Jumlah		18.227	16.855	35.082

Sumber: Data diolah (2021).

3. Keadaan Umum Pertanian

1) Tanaman Pangan

Komoditas pertanian yang banyak dijumpai di Kecamatan Way Ratai adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Komoditas dengan nilai produktivitas tertinggi adalah padi. Produksi padi sebesar 4.806,5 ton dengan luas panen padi sebesar 7.966 Ha. Ditinjau dari segi produksinya, padi merupakan komoditas unggulan di Kecamatan Way Ratai. Komoditas unggulan kedua adalah jagung dengan produksi sebesar 821 ton dan luas panen sebesar 75 Ha. Disusul oleh komoditas ubi kayu dengan produksi sebesar 717 ton dan luas panen sebesar 58 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020)

2) Hortikultura

Kecamatan Way Ratai memiliki berbagai macam tanaman hortikultura namun luas panen dan produksinya tidak terlalu besar, yaitu tanaman cabai, terong, dan mentimun. Komoditas hortikultura yang paling banyak ditanam di Kecamatan Way Ratai

adalah cabai dengan total produksi sebesar 133 ton dan luas panen sebesar 40 Ha.

3) Perkebunan

Kecamatan Way Ratai memiliki berbagai macam tanaman perkebunan, yaitu kakao, kelapa, cengkeh, dan pala. Tanaman kelapa merupakan salah satu komoditas unggulan di Kecamatan Way Ratai dengan total produksi sebesar 288 ton dan luas areal sebesar 18 Ha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020).

4) Peternakan

Kecamatan Way Ratai pada bidang peternakan, tercatat memiliki beberapa potensi ternak unggulan, seperti sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Masing-masing jumlah populasi hewan ternak tersebut adalah sebanyak 297 ekor sapi, 126 ekor kerbau, 4.815 ekor kambing, 20.075 ekor ayam kampung, 1.376 ayam petelur, 7.821 ayam pedaging, dan 2142 ekor itik (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, 2020).

C. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Gambaran Umum BUMDes Tunas Jaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pendirian BUMDes di Desa Gunung Rejo secara resmi yang dituangkan dalam Perdes Nomor 1 Tahun 2017 tentang pendirian BUMDes Tunas Jaya. Adanya peraturan tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui unit – unit usaha BUMDes dan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga nantinya Desa Gunung Rejo dapat menjadi desa

mandiri. Adapun unit usaha BUMDes Tunas Jaya yaitu usaha PAM Desa, pasar desa, dan usaha penggemukan sapi.

Unit usaha PAM Desa bergerak dalam usaha pelayanan air bersih desa untuk masyarakat guna kebutuhan sehari – hari. Sedangkan unit usaha pasar desa didirikan atas dasar untuk menumbuhkan iklim kewirausahaan desa dengan menampung hasil pertanian lokal desa dan memfasilitasi masyarakat desa bagi yang memiliki usaha menengah kecil mikro untuk membantu pemasaran produknya. BUMDes Tunas Jaya juga memiliki unit usaha peternakan yang berfokus pada usaha penggemukan sapi dengan memberdayakan kelompok tani ternak atas dasar potensi yang dimiliki. Tujuan didirikannya unit usaha tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan, menumbuhkan dan mengembangkan jiwa wirausaha anggota, dan menggali sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Gambaran Umum BUMDes Jaya Mandiri

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mandiri merupakan sebuah badan usaha milik desa yang berada di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. BUMDes ini memiliki peran sebagai lembaga penyedia barang dan jasa kebutuhan masyarakat serta pemberi pelayanan umum dibidang perekonomian masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Harapan Jaya. Tujuan didirikannya BUMDes Jaya Mandiri adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta memfasilitasi kegiatan perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki Desa Harapan Jaya.

Pendirian BUMDes di Desa Harapan Jaya secara resmi yang dituangkan dalam Perdes Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendirian BUMDes Jaya Mandiri. Adapun unit usaha BUMDes Jaya Mandiri terdiri dari unit

usaha lembaga keuangan mikro Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), unit usaha pasar desa, dan unit usaha pengelolaan kopi bubuk. Unit Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) menjalankan dan mengelola usaha simpan pinjam untuk membantu pengembangan kegiatan Usaha kecil Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Harapan Jaya. Unit usaha pasar desa pada BUMDes Jaya Mandiri mengelola dan memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produk lokal desa dan kebutuhan masyarakat desa yang lainnya. Unit usaha pengelolaan kopi bubuk bergerak dalam produksi pengolahan kopi lokal Desa Harapan Jaya.

3. Gambaran Umum BUMDes Tunas Jaya Asri

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Jaya Asri adalah BUMDes yang berkedudukan di Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka diputuskan melalui musyawarah desa Ceringin Asri untuk mendirikan BUMDes dengan nama “Tunas Jaya Asri” berdasarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017. Maksud pembentukan BUMDes ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan dan pengembangan unit-unit usaha desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai tujuannya, BUMDes Tunas Jaya Asri menjalankan jenis-jenis usaha antara lain, unit usaha simpanan dan pinjaman, unit usaha perdagangan atau lumbung pangan desa, unit usaha PAM Desa, dan unit usaha pertanian. Jenis usaha keuangan mikro masyarakat BUMDes Tunas Jaya Asri adalah berupa tabungan dan pinjaman masyarakat Desa Ceringin Asri yang dihimpun oleh BUMDes. Usaha ini diadakan dengan tujuan untuk memberi dukungan kepada masyarakat

dalam meningkatkan usahanya agar lebih berkembang, serta membantu masyarakat untuk menabung untuk kebutuhan mendatang, seperti kebutuhan sekolah dan kebutuhan berusahatani serta kebutuhan usaha mikro. Unit usaha perdagangan bergerak menjalankan usaha warung desa yang menjual kebutuhan secara grosir maupun eceran sembako, sayuran dan kebutuhan masyarakat lainnya. Unit usaha PAM Desa bergerak dalam usaha berupa pelayanan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Desa Ceringin Asri. Serta unit usaha pertanian BUMDes Tunas Jaya Asri bergerak dalam usaha budidaya jamur tiram.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tingkat efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran berada pada klasifikasi tinggi. Hal tersebut berdasarkan pencapaian tujuan BUMDes dan kepuasan anggota, karena kegiatan usaha BUMDes telah mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dan sudah memberikan kepuasan terhadap para anggotanya.
- 2) Faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yaitu peran pemimpin, partisipasi anggota, dan dukungan eksternal BUMDes. Faktor yang tidak berhubungan nyata dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu tingkat pengetahuan anggota.
- 3) Tingkat perkembangan BUMDes di Kecamatan Way Ratai paling tinggi yaitu BUMDes Tunas Jaya Desa Gunung Rejo. Hal itu berdasarkan kontribusi mereka yang paling tinggi terhadap pendapatan asli desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah desa diharapkan untuk lebih giat lagi dalam upaya pendampingan pengelolaan usaha BUMDes dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa untuk dijadikan unit usaha BUMDes agar pembentukan usaha BUMDes dapat tepat sasaran.
- 2) Bagi BUMDes diharapkan dapat lebih selektif dalam menentukan jenis usaha BUMDes dan membuat peraturan atau kebijakan yang tepat tentang pengelolaan unit usaha BUMDes agar efektif di lapangan.
- 3) Bagi peneliti lain, disarankan agar dapat meneliti variabel lain yang berhubungan terhadap efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau faktor-faktor yang berhubungan dengan efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, R. 2020. *Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Pati*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. Pati.
- Alkadafi. 2014. Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal El-Riyasah, 1(1)* : Hal 32 - 40.
- Ambarwati, A. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Media Nusa Creative. Malang.
- Ansari, B.I. 2016. *Komunikasi Matematik Strategi Berfikir dan Manajemen Belajar : Konsep dan Aplikasi*. Penerbit Pena. Banda Aceh.
- Armia, C. 2002. Pengaruh Budaya terhadap Efektivitas Organisasi: Dimensi Budaya Hofstede. *JAAI, Vol. 6 No 1* : Hal 103 – 113.
- Astuti, A. 2010. Analisis efektivitas kelompok di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020. *Statistik Indonesia Tahun 2020*. Indonesia. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran. 2020. *Pesawaran dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik. Pesawaran..
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. Jakarta.
- Baradi, M. 2019. Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengelolaan Aset Desa Dan Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.

- Beni, P. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat.
- Dewi, A. 2010. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia dilengkapi contoh kuisioner*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Diarti, M. A. 2020. Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan BUMDes Se-Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik. *Skripsi*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Efendi, S. 2019. Strategi Pengembangan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol.6 No 4* : Hal 327 – 328.
- Furqon, A. 2018. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Masyarakat Pada BUMDes Desa Rombasan Sumenep. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Makro, Vol. 3 No. 1* : Hal 109 – 121.
- Gorda, I. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia.cetakan ke tiga*. Astabrata Bali. Denpasar.
- Handayani, D. A. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sukoharjo.
- Harobu, F. U. Laru., dan S. Suprojo. 2019. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Politik Vol.1 No.4* : Hal 367-371.
- Irsa, R., D. Nikmatullah., dan K. K. Rangga. 2018. Persepsi Petani Dan Efektivitas Kelompok Tani Dalam Program Upsus Pajale Di Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang. *JIA Vol 6 No. 1* : Hal 1-8.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016. *Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Rencana Strategis Pengembangan Daerah Tertentu Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Kirowati, D. 2018. Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi). Vol. 1* : Hal 15 - 24

- Kusnadi, D. 2006. Kepemimpinan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Efektivitas Kelompok Tani. *Jurnal Penyuluhan Pertanian Vol.1 No.1* : Hal 48 – 60.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIE YKPN. Jakarta.
- Mantra, I. B. 2003. *Demografi Umum*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2017. *Efisiensi dan Efektifitas*. Andy. Jakarta.
- Mardikanto, T. 1987. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Mutakin., S. Gitosaputro., dan R. Adawiyah. 2013. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Dalam Menunjang Pembangunan Pertanian Di Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat. *JIIA Vol 1 No. 2* : Hal 134 - 139.
- Nasdian, T. F. 2011. Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 5 No 1* : Hal 51 – 70.
- Nazir, M. 1988. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nurhasan, A. J. 2020. Efektivitas Peran BUMDes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer Vol 1 No 2* : Hal 88 – 99.
- Nurliani, R., N. Firiya., dan Burhanudin. 2018. Peran Kepala BUMDes Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *eJournal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No.4* : Hal 1607 – 1620. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Purnomo, J. 2016. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)*. INFEST. Yogyakarta.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Rachmawati, I. K. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Riduwan. 2009. *Belajar Mudah Penelitian*. Alfabeta. Bandung.

- Safira, A. 2018. Efektivitas Program Upsus Pajale Terhadap Peningkatan Pendapatan Usahatani Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sasauw, C. 2018. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol 1 No 1* : Hal 1-10.
- Satia, R, S. 2018. Partisipasi Dan Efektivitas Ekonomi Mikro Pinjaman Bergulir BUMDES di Desa Cilebut Barat Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 2 (6):783-792*.
- Siagian, S. P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Siegel, S. 1985. *Statistika Nonparametrik, Suatu Tafsiran dari Nonparametrik Statistics for Behavioral Sciences, oleh M. Sudrajat SW*. PT Armico. Bandung.
- Smith, J.L. 1997. *Occupational Ergonomics : Principles and Applications*. Chapman & Hall. London.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudirja, R. 2007. Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Program Pembangunan Pertanian di Pedesaan. Bandung (ID). *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran.
- Sugiyarto. 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian*. CV Alfa Beta. Bandung
- Uphoff, T. N. 1977. *Rural Development Participation, concepts and measures for project design, implementation and evaluation*. Cornell University.
- Widiarti, E. 2010. Analisis Margin Pemasaran Jahe Di Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Wijaya, D. 2018. *BUM DESA: Badan Usaha Milik Desa*. Gava Media. Yogyakarta.
- Wilaga, A. N. 2020. Peranan Pemuda Tani Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa Ramaksa Di Desa Sungai Langka Kecamatan

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Skripsi*. Universitas Lampung.
Bandar Lampung.